

**LARANGAN MENIKAHI MANTAN ISTRI ATAU MANTAN SUAMI  
DARI KELUARGA SATU DATUAK DITINJAU DARI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi  
Kasus di Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman  
Kabupaten Pasaman Barat)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam*



*Oleh:*

THESA

1413010280


JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL PADANG  
1439/2018

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul : **“Larangan Menikahi Mantan Istri Atau Mantan Suami dari Keluarga Satu Datuak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”**. Disusun oleh Thesa BP. 1413010280 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasah. Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Padang, 3 Agustus 2018

**Pembimbing I**



**Dra. Hj. Kholidah, M.Ag**  
**Nip. 196403231992032003**

**Pembimbing II**



**Afifah Jalal, SH. MH**  
**NIP. 196810102005102007**

## ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah “**Larangan Menikahi Mantan Istri Atau Mantan Suami Dari Keluarga Satu Datuak Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat)**”. Disusun oleh Thesa, NIM 1413010280. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya aturan adat yang melarang seseorang menikahi mantan istri atau mantan suami dari teman satu datuak di Kenagarian Aia Gadang Kabupaten Pasaman Barat. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah apa yang melatarbelakangi terjadinya larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari teman satu datuak, apa yang menjadi tujuan larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari teman satu datuak dan bagaimana larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari teman satu datuak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka digunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan sosio legal research, untuk teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah *pertama*, Latar belakang larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak adalah karena pernah terjadi suatu peristiwa seseorang menikah dengan mantan suami dari keluarga satu datuaknya. Setelah pernikahan tersebut dilangsungkan, ternyata pernikahan tersebut menimbulkan konflik antara seseorang yang menikah dengan mantan istri dari keluarga satu datuaknya dengan keluarga satu datuaknya tersebut dan semenjak kejadian tersebut maka diberlakukanlah larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak. *Kedua*, tujuan larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak di Kenagarian Aia Gadang adalah agar tidak adanya perpecahan antara keluarga satu datuak. Menurut masyarakat di Kenagarian Aia Gadang teman satu datuak ini sama ibaratnya dengan saudara kandung sendiri. *Ketiga*, Tinjauan Hukum Islam tentang larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak adalah larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu *datuak* termasuk kepada *al-urf al-fasid* karena bertentangan dengan nas dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Oleh karena itu larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu *datuak*, larangan itu haram karena tidak sesuai dengan larangan yang ada dalam al-Quran dan sunnah Nabi. Dan ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 8 huruf f) terhadap larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari teman satu datuak adalah hukum adat termasuk kepada “peraturan lain” dan larangan menikahi mantan istri atau mantan suami dari keluarga satu datuak dinagari Aia Gadang juga termasuk kepada peraturan lain.

## ABSTRACT

The title of this research is "**Prohibition of Marrying Ex-Wife or Ex-Husband of One Datuak Friend In Review Of Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage (Case Study in Kenagarian Aia Gadang District Pasaman, West Pasaman Regency)**". Compiled by Thesa, NIM 1413010280. This research is motivated by the existence of customary rules that prohibit someone from marrying ex-wife or ex-husband from a friend in Datuak in Kenagarian Aia Gadang, West Pasaman Regency. The research question in this thesis is what lies behind the prohibition of marrying ex-wives or ex-husbands from friends, what are the goals of the prohibition of marrying ex-wives or ex-husbands from friends and how to prohibit marrying ex-wives or ex-husbands from friends? in terms of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. To answer this question, the type of field research is used and for data processing and analysis techniques in this study the authors use qualitative analysis methods. The results of this thesis research are first, The background to the prohibition of marrying ex-wife or ex-husband from a friend is because there has been an event someone married his ex-husband from a friend. After the wedding was held, it turned out that the marriage caused a conflict between someone who married his friend and friend and his friend and since the incident there was a ban on marrying ex-wife or ex-husband from a friend. Second, the purpose of the prohibition on marrying ex-wives or ex-husbands from a single friend in Kenagarian Aia Gadang is so that there is no division between friends. According to the community in Kenagarian Aia Gadang, this datuak friend is like a sibling. Third, Review of Law Number 1 of 1974 concerning marriage against the prohibition of marrying ex-wife or ex-husband from a friend, is a customary law not included in other regulations because it is clearly stated in the Koran an-Nissa letter paragraph 23 and Law No. 1 of 1974 concerning marriage does not explain the prohibition, in terms of the validity of the prohibition on marrying ex-wives or ex-husbands from friends, including the Receptive Exit theory, customary law that is not in line with the provisions of Islamic law must be issued, opposed or rejected.